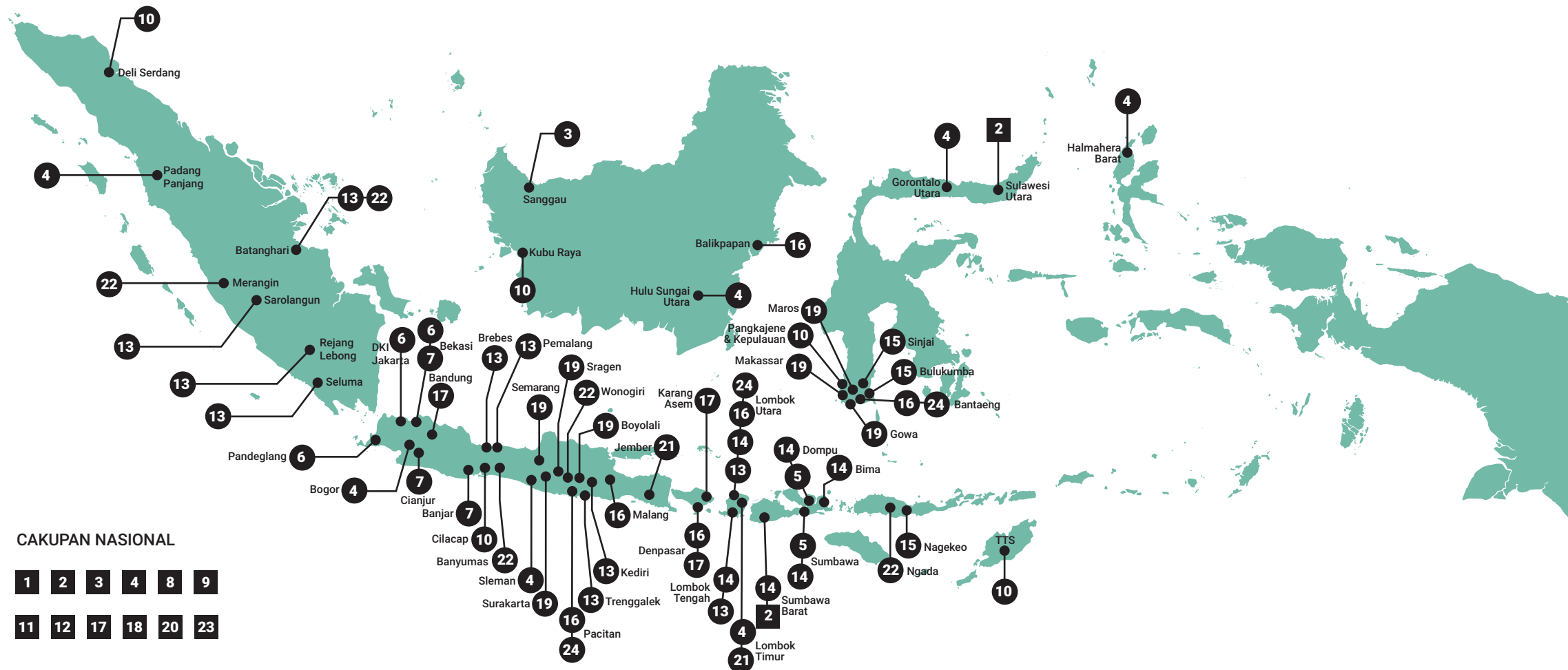




LAPORAN TAHUNAN 2016

Menuju Kebijakan Promasyarakat Miskin melalui Penelitian



- 1** Studi tentang Kerja Pengasuhan dan Perawatan Tak Berbayar di Indonesia
- 2** Tinjauan Capaian MDGs dan Kesiapan Menuju SDGs
- 3** Reformulasi Strategi Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 4** Cakupan Pelayanan Kesehatan Universal di Indonesia: Penilaian Awal tentang Tantangan dan Peluang bagi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- 5** Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program EINRIP: Studi Sosial Kualitatif Setelah Perbaikan Jalan di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat-2015
- 6** Studi Opini Para Tokoh tentang Pemberian Makanan Bayi dan Anak Usia Dini
- 7** Menjamin Ketahanan Pangan dan Gizi pada Masa Gejolak Harga Pangan-Fase 3
- 8** Kemiskinan Multidimensi pada Anak: Perkembangan Terkini dan Analisis Mendalam
- 9** Kemiskinan dan Disparitas pada Anak Perkotaan: Suara Lirih Anak Indonesia yang Hidup dalam Kemiskinan
- 10** Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM
- 11** Penguatan Program Jaring Pengaman Berbasis Pangan: Perbandingan Pelaksanaan, Evolusi, dan Pembelajaran antar negara (Kasus Indonesia)
- 12** Kajian Penggunaan Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2010
- 13** Pemantauan Proses Pelaksanaan PKKPM-P2B 2015–2016
- 14** Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 15** Pemantauan dan Evaluasi Dampak Program EINRIP: Studi Sosial Kualitatif Setelah Perbaikan Jalan di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur-2016
- 16** Kajian Awal Pelaksanaan Program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung Kube-PKH)
- 17** Penguatan Pelayanan Kesehatan di Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN: Implikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
- 18** Studi Ketenagakerjaan *Employment Transformation*
- 19** Studi Kebijakan Pengurangan Ketimpangan di Indonesia
- 20** Pemutakhiran Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia
- 21** Studi Diagnostik mengenai Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan, Khususnya di Perkebunan Tembakau
- 22** Studi Tata Kelola Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- 23** Studi Penyusunan Strategi Kelulusan dari Program Keluarga Harapan (PKH)
- 24** Studi Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)





Menuju Kebijakan Pro masyarakat Miskin melalui Penelitian



The SMERU Research Institute Cataloging-in-Publication Data

The SMERU Research Institute.

Laporan tahunan 2016

/ written by The SMERU Research Institute.

40 p. ; 27 cm.

Includes index.

ISBN 978-602-7901-43-8

ISSN 977-259-7881-00-3

1. Research. I. Title

001.4--ddc22

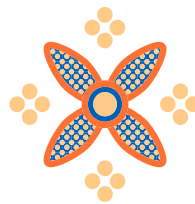
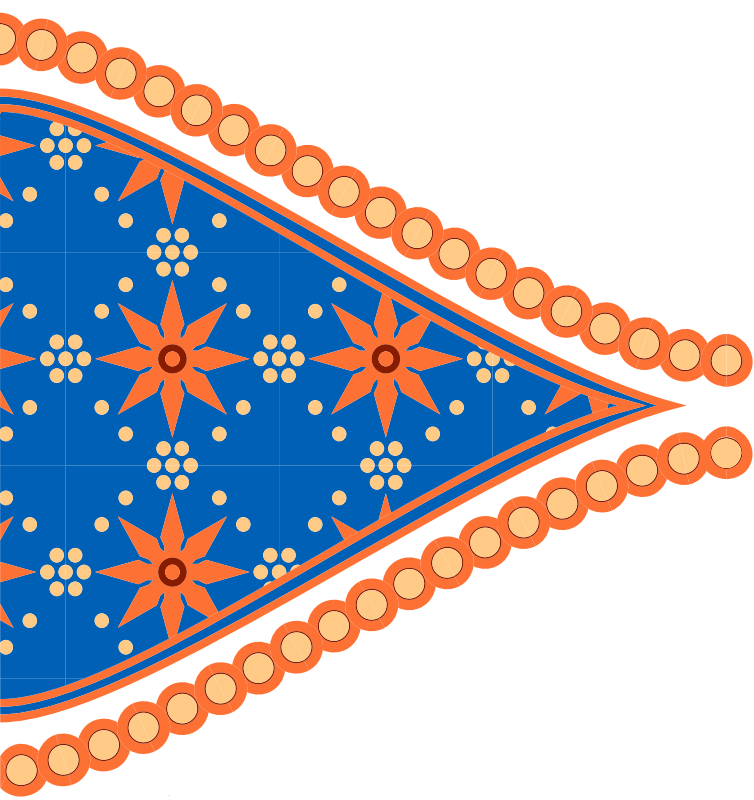
 The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute





TENTANG KAMI

The SMERU Research Institute adalah sebuah lembaga independen yang melakukan studi kebijakan publik dan merupakan lembaga terdepan dalam penelitian di bidang kemiskinan dan ketidaksetaraan di Indonesia. Kerja penelitian kami berfokus pada berbagai aspek sosial-ekonomi yang sangat penting bagi isu-isu pembangunan kontemporer di Indonesia. Kami mengkhususkan diri pada analisis kemiskinan, penelitian kebijakan, dan pemantauan dan evaluasi. Ketiga elemen penghasil pengetahuan yang saling berhubungan ini diarahkan untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti yang tepat bagi orang-orang paling miskin dan rentan di Indonesia.

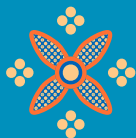
Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas dari kemiskinan absolut dan ketidakmerataan yang tinggi melalui penelitian yang bertujuan menghasilkan strategi, kebijakan, dan aksi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan yang berbasis bukti.

Misi

- Melakukan penelitian mengenai berbagai isu terkait kemiskinan guna memperbaiki kebijakan publik dan swasta, serta pelaksanaannya
- Melakukan penjangkauan efektif kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, masyarakat sipil, kalangan akademis, komunitas internasional, dan sektor swasta
- Mendukung wacana kebijakan publik dan swasta yang inklusif mengenai strategi penanggulangan kemiskinan dan ketidakmerataan
- Memperkuat peran masyarakat sipil dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dan swasta

SAMBUTAN PEMBINA



Gema Satria/SMERU

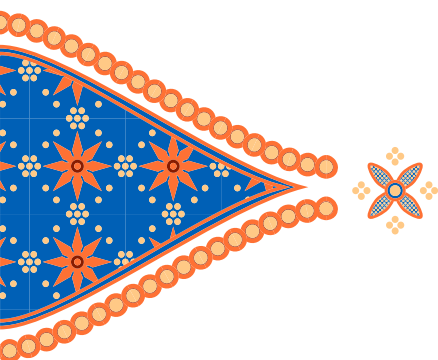
Meskipun konsep desentralisasi dan otonomi daerah sebagai basis pengembangan demokrasi di Indonesia sudah muncul pada masa awal kemerdekaan melalui Undang-Undang (UU) No. 1/1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah dan UU No. 22/1948 tentang Pemerintah Daerah, dalam praktiknya pemerintah kala itu masih menerapkan politik sentralisasi. Setelah berlangsung lebih dari setengah abad, barulah rakyat bisa mengoreksi hal tersebut dengan disepakatinya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dilaksanakan secara konsekuen dalam pengelolaan administrasi pemerintahan dan terus disempurnakan—terakhir diperbarui melalui UU No. 23/2014. Pada awalnya, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ini menghadapi banyak tantangan, tetapi kini telah muncul berbagai inovasi daerah dan makin bertambah jumlah pejabat daerah yang berkembang menjadi pejabat nasional.

Setelah lebih dari satu dekade menjalankan kebijakan otonomi daerah dengan titik berat di tingkat kabupaten/kota, masyarakat politik Indonesia mulai percaya diri untuk memberi ruang bagi demokrasi di tataran akar rumput dengan mengesahkan UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa). Sesungguhnya masyarakat desa telah lama mengenal otonomi desa. Akan tetapi, mereka cenderung hanya memilih sosok karena konsep mengenai organisasi yang berfungsi menata suara dan kegiatan rakyat belum berkembang. Kondisi seperti itu masih tecermin dalam kehidupan kemasyarakatan kita sekarang dan menghambat pembangunan demokrasi yang egaliter.

Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, yakni sekitar tahun 2000, SMERU melakukan studi-studi mengenai pelaksanaan otonomi daerah dan hasilnya telah digunakan untuk memberikan masukan bagi berbagai kebijakan. Selanjutnya, SMERU terus mengarusutamakan isu desentralisasi dan otonomi daerah dalam berbagai kajiannya, khususnya terkait isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Mulai akhir 2015, SMERU melakukan studi kualitatif untuk memantau pelaksanaan UU Desa—kajian difokuskan pada aspek tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Studi ini tentunya sangat penting dan SMERU berkewajiban mewacanakan hasil kajiannya, terutama tentang pemberdayaan masyarakat dalam mengorganisasikan kemandirian mereka.

Dalam penelitian sosial-ekonomi di Indonesia, SMERU menempati posisi spesial di kalangan pejabat publik dan akademisi, terutama di tingkat nasional. Pada tahun-tahun mendatang, SMERU perlu meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Langkah-langkah SMERU ke arah ini, seperti (i) mengadakan Forum Berbagi Hasil Penelitian di Kota Surakarta yang dihadiri pihak-pihak terkait, dan (ii) berbagi pengetahuan tentang metode penelitian dengan beberapa lembaga penelitian (di perguruan tinggi), perlu dilanjutkan dan diperluas cakupannya.

Tanpa kerja keras peneliti dan dukungan pengorganisasian yang kuat oleh manajemen, semua kegiatan SMERU tersebut akan sulit tercapai. Di samping itu, dukungan pendanaan dari lembaga donor, khususnya dana hibah dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australia, melalui Program Knowledge Sector Initiative (KSI), telah memberikan dukungan signifikan bagi SMERU. Program ini juga telah memberi kesempatan bagi SMERU untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya serta bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan lembaga-lembaga mitra kerja KSI lainnya. Untuk semua itu, atas nama Pembina Yayasan SMERU, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih. ❖



Dr. Syaikhul Usman
Ketua

SAMBUTAN MANAJEMEN



Gema Satria/SMERU

Komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata merupakan agenda besar pembangunan di seluruh dunia. Komitmen ini terangkum dalam Sustainable Development Goal (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 tujuan dan 169 target turunan; dengan target utama menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensi, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Agenda baru SDGs ini dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif. Dengan tujuan dan target yang lebih banyak, tentunya tantangan yang dihadapi dalam usaha pencapaian SDGs akan lebih berat.

Menanggapi tantangan ini, Bappenas selaku koordinator pelaksanaan SDGs di Indonesia meminta SMERU melakukan kajian pencapaian MDGs dan persiapan menuju SDGs di Indonesia. Studi ini memberikan pembelajaran dan masukan, khususnya bagi Pemerintah Pusat, dalam hal perencanaan, penganggaran, dan koordinasi pelaksanaan SDGs.

Selain itu, SMERU terlibat dalam proses perumusan berbagai kebijakan dengan Bappenas melalui, antara lain, diskusi-diskusi perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Pada kesempatan lain, hasil temuan studi *baseline* (awal) UU Desa dijadikan bagian dari modul pelatihan untuk pendamping desa yang disusun oleh Bappenas.

Saat ini, isu ketimpangan antardaerah di Indonesia juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Pengurangan ketimpangan yang tinggi makin penting untuk dilakukan agar target pengentasan kaum miskin yang tertuang dalam RPJMN dan SDGs dapat tercapai. Pada akhir 2016, SMERU menyiapkan *concept note* (catatan konsep) terkait isu ketimpangan di

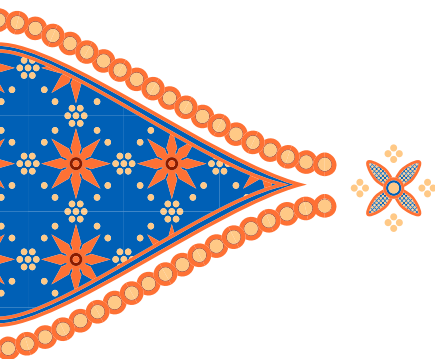
Indonesia untuk memenuhi permintaan staf khusus Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini menunjukkan komitmen SMERU untuk proaktif memberi masukan mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

SMERU terus berupaya untuk terlibat dalam dialog dan komunikasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan di tingkat subnasional. Terkait hal ini, pada Maret 2016, SMERU, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta, mengadakan "Lokakarya Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin". Acara ini bertujuan membangun dialog kebijakan yang konstruktif serta membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi SMERU untuk berdiskusi dan memperkenalkan kegiatan penelitian dan publikasi SMERU, khususnya studi-studi SMERU yang pernah dilakukan di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan keberlanjutan finansial, SMERU mulai mengembangkan rencana bisnis yang difokuskan pada pengembangan kapasitas internal organisasi dan memperluas kerja sama dengan pihak eksternal. Rencana bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan SMERU dalam mengelola sumber-sumber pendanaan secara berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian dengan memperbesar proporsi dana yang bersumber dari dana hibah kompetitif.

Menutup tahun 2016, SMERU melakukan studi banding ke beberapa lembaga penelitian di Yogyakarta, yaitu SurveyMETER, PSKK UGM, PKMK FK UGM, IRE, IDEA, dan HRC. Kegiatan ini bertujuan mendalami konsep dan praktik-praktik terkait pengembangan organisasi secara berkelanjutan di lembaga-lembaga tersebut. Pembelajaran dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman manajemen dan staf SMERU dalam mengambil berbagai keputusan strategis untuk mendorong kemandirian Lembaga.

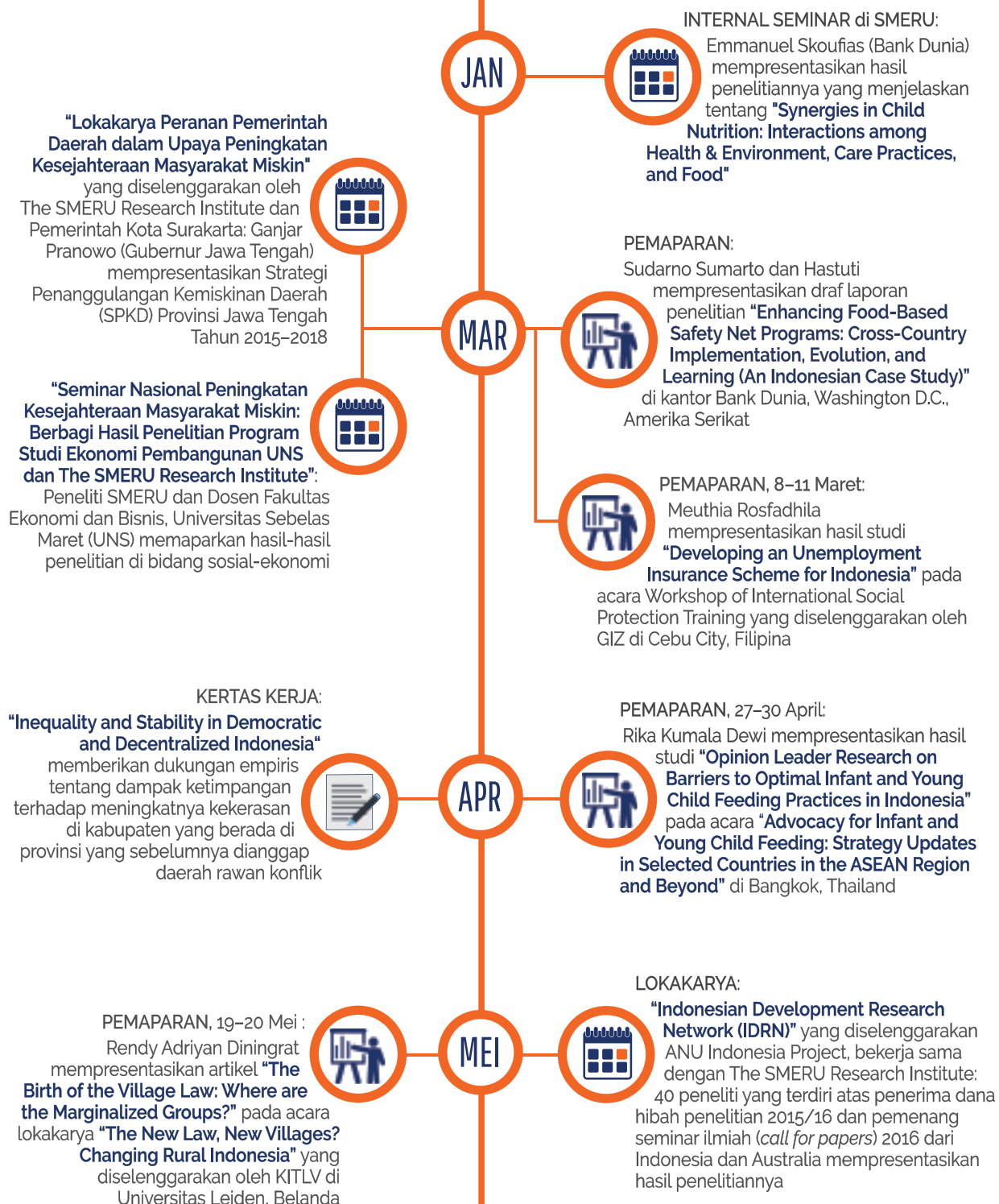
Laporan ini memotret ruang lingkup kerja kami sepanjang 2016 yang tidak mungkin dapat kami capai tanpa dedikasi, komitmen, dan profesionalitas seluruh staf SMERU. Kami sangat bangga atas apa yang telah kami capai dan menantikan perjalanan yang akan datang. ❖

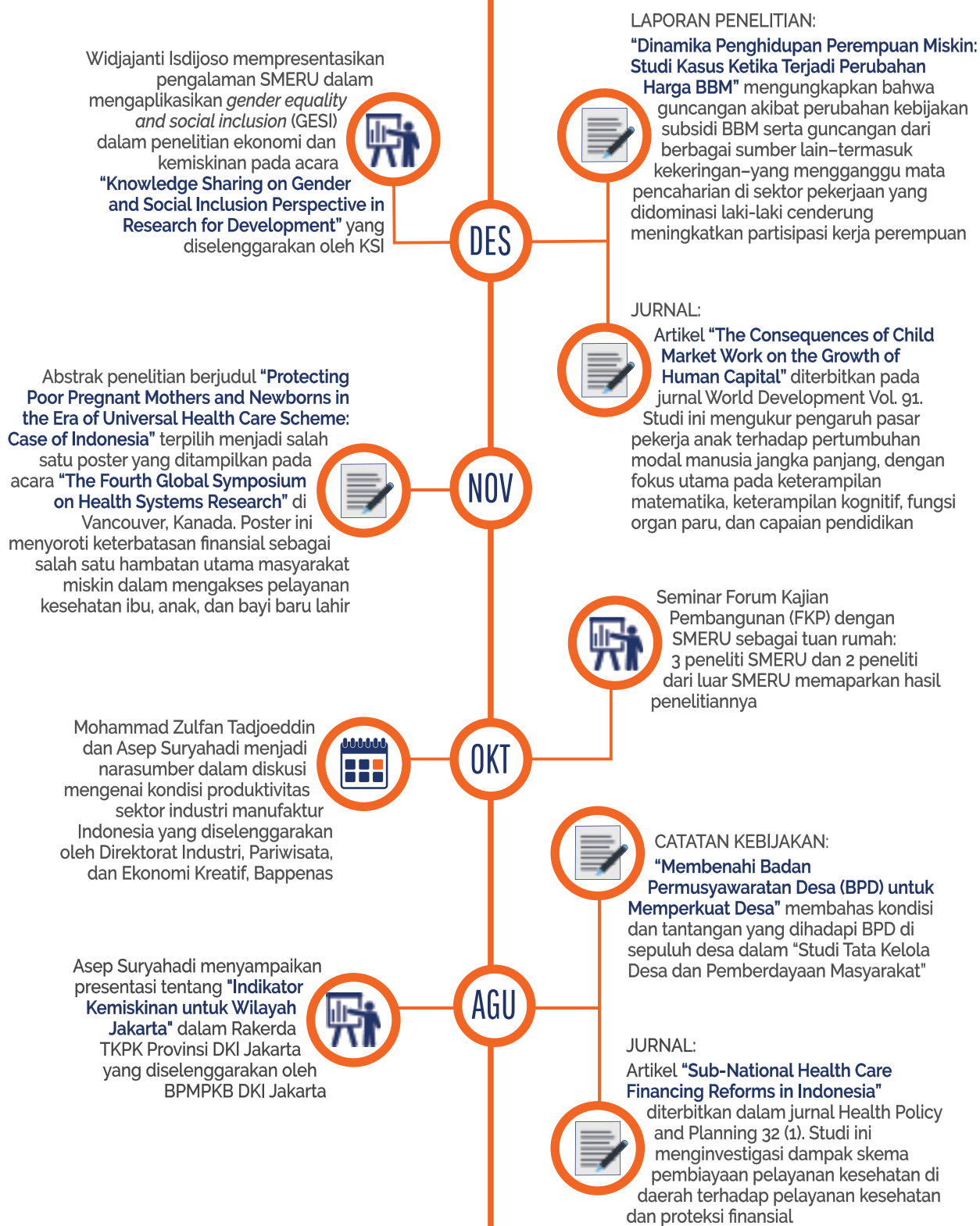
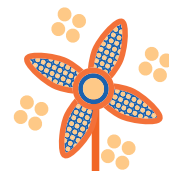


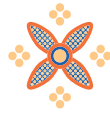
Dr. Asep Suryahadi
Direktur



MOMEN PENTING SMERU 2016







JEJARING SMERU 2016

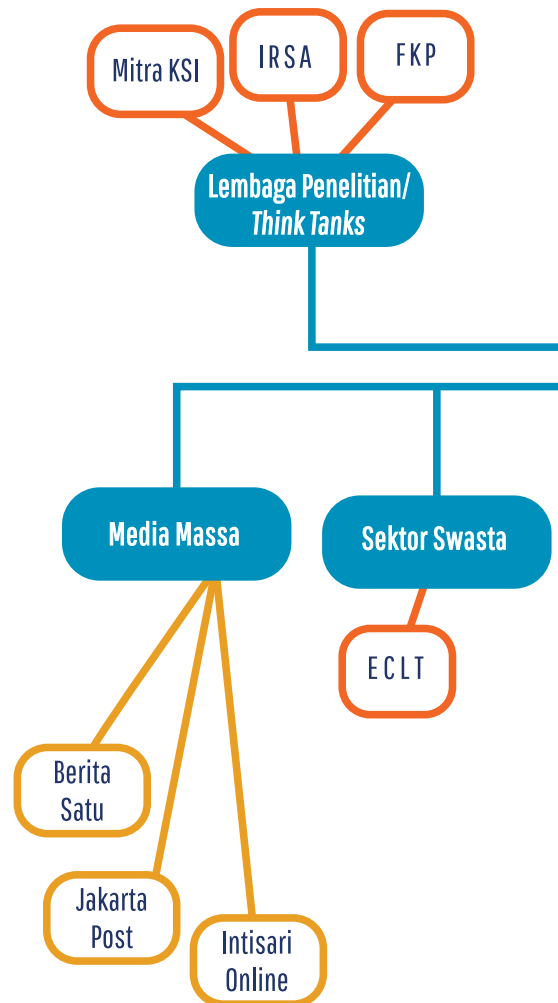
Sepanjang 2016, SMERU terus memperkuat kegiatan jejaring dengan berbagai pihak. Meskipun dari segi jumlah tidak banyak meningkat, intensitas dan kualitas komunikasi kami tingkatkan sehingga dapat berjalan dua arah.

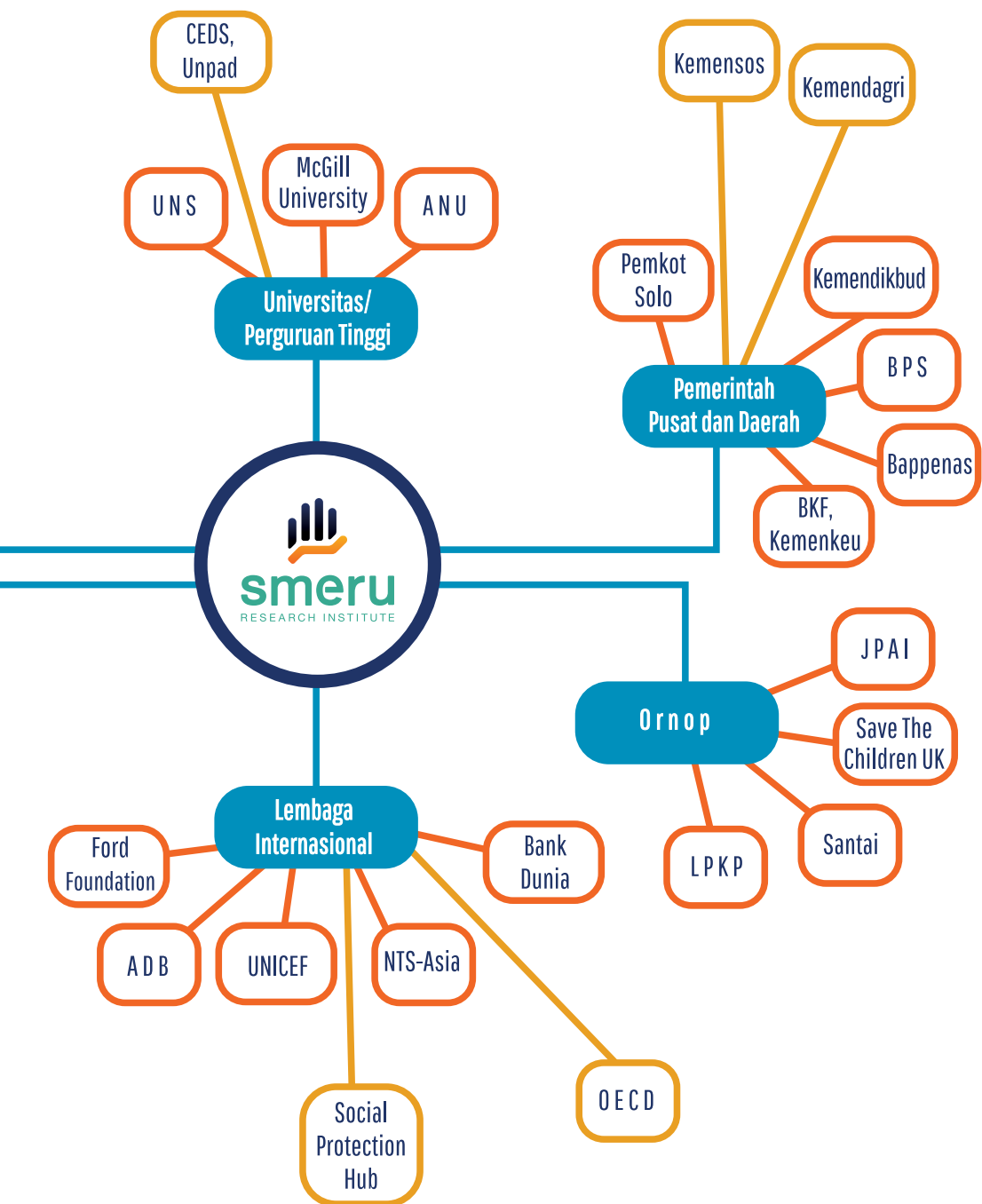
Pemerintah terus menjadi pemangku kepentingan utama kami karena misi utama SMERU adalah meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian SMERU bagi perbaikan kebijakan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Meskipun demikian, SMERU terus membangun relasi dengan lembaga internasional, lembaga penelitian, universitas, organisasi nonpemerintah, dan dunia usaha sebagai mitra strategis. Kami juga mulai membangun relasi dengan media massa sebagai mitra dalam melakukan amplifikasi isu-isu kebijakan yang menjadi kajian SMERU.

Hubungan kerja sama

Hubungan komunikasi

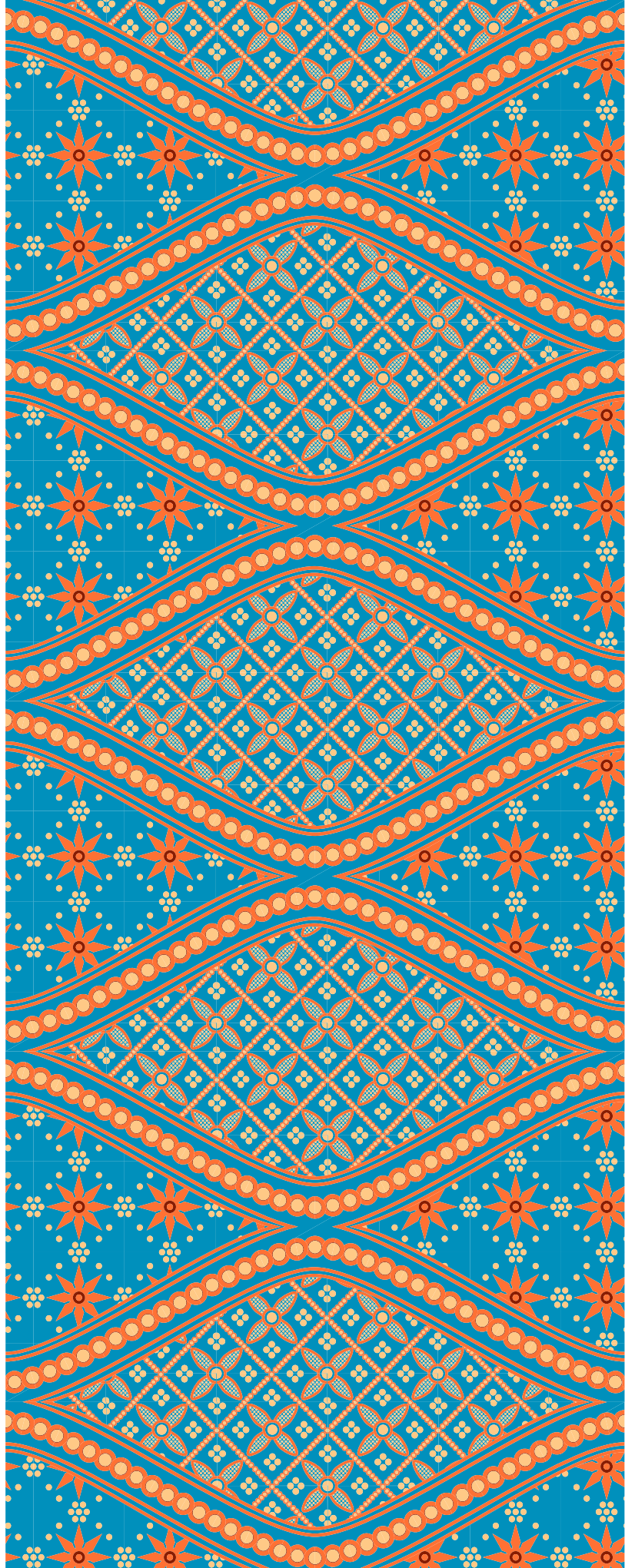


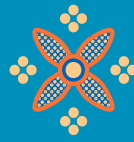


MOTIF BATIK KHAS SOLO

Motif pada batik tradisional klasik selalu memiliki filosofi tersendiri. Pada motif batik, khususnya di Jawa Tengah, terutama Solo dan Yogyakarta, setiap gambar memiliki makna.

Hal ini berhubungan dengan arti atau makna filosofis dalam kebudayaan Hindu-Jawa. Pada motif tertentu, ada yang dianggap sakral dan hanya dapat dipakai pada kesempatan atau peristiwa tertentu.





1

PETA CAKUPAN WILAYAH PENELITIAN SMERU 2016

3

TENTANG SMERU

4

SAMBUTAN

8

MOMEN PENTING SMERU 2016

10

JEJARING SMERU 2016

14

KEGIATAN UTAMA KAMI

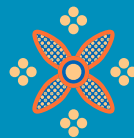
Sorotan Penelitian
Penjangkauan

30

ORGANISASI KAMI

36

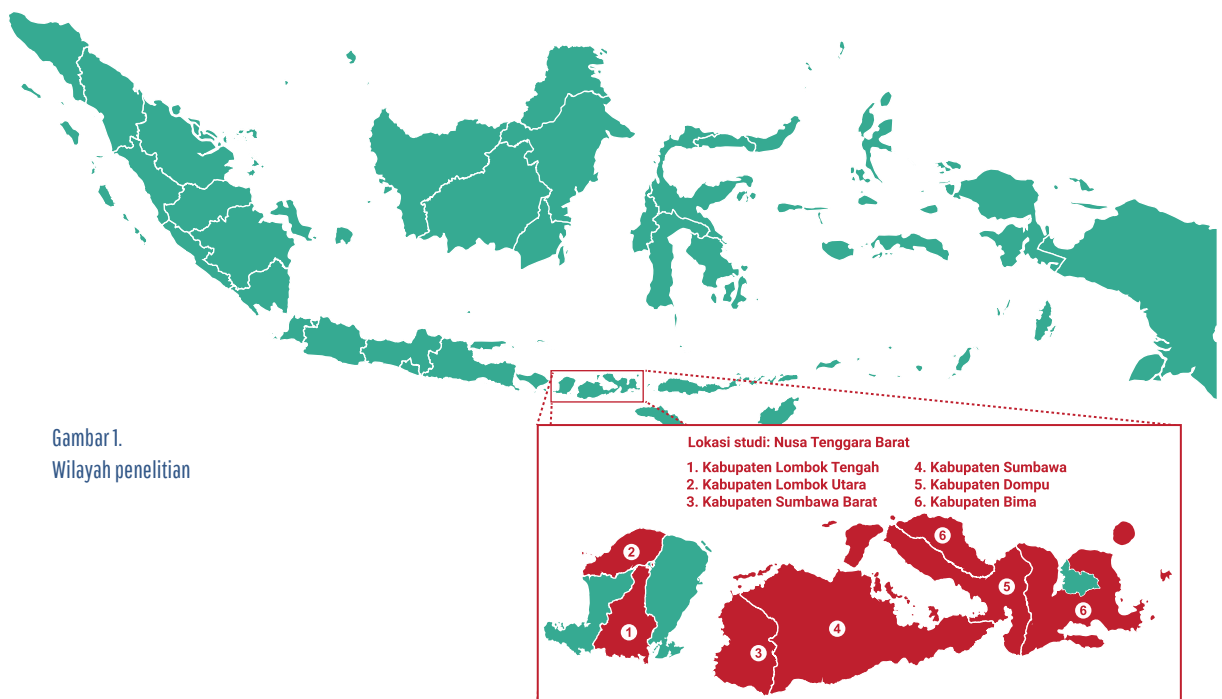
LAPORAN KEUANGAN

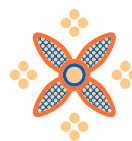


STUDI DIAGNOSTIK PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dalam rangka membantu persiapan Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), pada Juli–Agustus 2016, The SMERU Research Institute melaksanakan studi kualitatif di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gambar 1). Studi ini ditujukan untuk memahami konteks sosial-politik-ekonomi, perkembangan inovasi pembelajaran, dan pemetaan pemangku kepentingan, dengan fokus pada pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.

Studi ini menemukan sepuluh permasalahan utama dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar (Gambar 2). Empat di antaranya berkaitan dengan manajemen guru, yaitu rendahnya kualitas guru, kurang dan tidak meratanya jumlah guru, kurangnya pelatihan guru, dan rendahnya komitmen guru. Sementara itu, enam permasalahan lainnya adalah kurangnya dukungan anggaran dan infrastruktur pendidikan, rendahnya dukungan orang tua, rendahnya minat belajar anak, kuatnya pengaruh politik, ketidaktuntasan belajar murid, dan lemahnya pengawasan. Berbagai permasalahan dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar tersebut pada akhirnya menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Untuk itu, perlu diupayakan jalan keluarnya melalui, antara lain, (i) penyelesaian persoalan kualitas dan manajemen guru guna menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah memadai dan (ii) perbaikan sistem belajar-mengajar yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi.





Di sisi lain, di semua kabupaten studi ditemukan inovasi-inovasi pembelajaran. Jumlah dan bentuk inovasinya bervariasi antarkabupaten. Dampak berbagai inovasi tersebut belum dapat dievaluasi karena kecilnya jumlah dana, sedikitnya jumlah penerima, dan pendeknya periode pelaksanaan program. Namun, terdapat indikasi bahwa kabupaten yang memiliki jumlah inovasi lebih banyak cenderung memiliki kinerja pendidikan dasar—dilihat dari angka putus sekolah, nilai rata-rata hasil uji kompetensi guru (UKG), nilai rata-rata ujian nasional, angka partisipasi sekolah, dan rasio murid-guru—yang lebih baik.



Mukti Mulyana/SMERU

Gambar 2. Permasalahan utama pembelajaran murid SD dan SMP di Indonesia

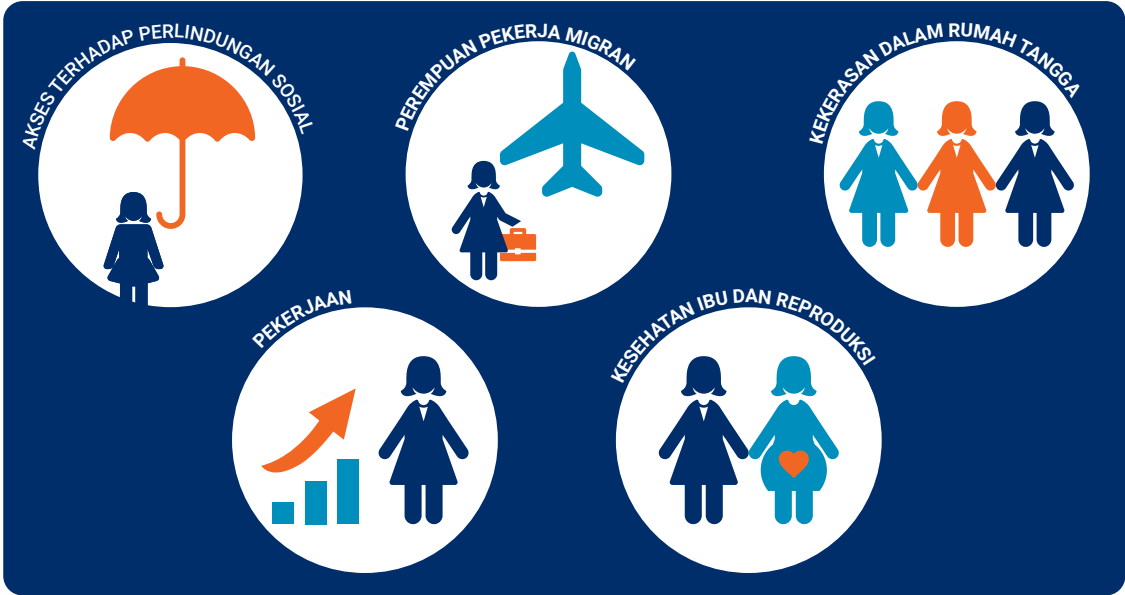
Studi ini juga memetakan peranan aktor-aktor utama dalam pembelajaran yang meliputi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas Pendidikan. Meskipun secara umum sekolah dan Dinas Pendidikan dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh paling tinggi, di empat dari enam kabupaten studi ini justru bupati yang dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh lebih tinggi. Di tiga kabupaten studi, DPRD juga dianggap memiliki ketertarikan dan pengaruh yang tinggi, meskipun posisinya masih di bawah sekolah. Tingginya tingkat ketertarikan bupati dan DPRD tersebut sangat menentukan besarnya dukungan anggaran bagi pendidikan dasar dan beragamnya jenis inovasi yang ditujukan bagi guru dan murid. ❖



Dok. SMERU

DINAMIKA PENGHIDUPAN PEREMPUAN MISKIN: STUDI KASUS KETIKA TERJADI PERUBAHAN HARGA BBM

Studi yang dilakukan pada lima kabupaten¹ ini merupakan bagian dari rangkaian studi longitudinal sepanjang 2014–2020 yang bertujuan menganalisis dampak kebijakan penetapan subsidi tetap (*fixed subsidy*) BBM tahun 2015 terhadap penghidupan perempuan miskin pada lima tema penghidupan (Gambar 1). Di samping itu, studi ini juga mempelajari dampak penerimaan tiga program perlindungan sosial² yang tercakup dalam Program Perlindungan Sosial (PPS) 2014 terhadap penghidupan perempuan miskin pada lima tema tersebut.



Gambar 1.
Lima tema penghidupan perempuan miskin



Terdapat tiga temuan utama dalam studi ini. Pertama, meskipun perubahan kebijakan subsidi tetap BBM merupakan sumber guncangan berskala nasional yang dialami seluruh wilayah studi, intensitas dampaknya berbeda-beda antarwilayah studi karena adanya sumber guncangan lokal lainnya. Sumber guncangan lain tersebut adalah kekeringan dan turunnya harga komoditas pertanian yang merupakan sumber penghasilan utama kelompok miskin di beberapa wilayah studi.

Gambar 2.

Temuan studi: pengurangan subsidi BBM dan berbagai guncangan ekonomi lain mendorong perempuan melakukan lebih banyak pekerjaan tambahan, selain tetap mengurus keluarga



Kedua, pada wilayah studi di mana guncangan menerpa sektor pekerjaan yang didominasi laki-laki, perempuan cenderung menambah jumlah pekerjaan yang dilakukan guna mempertahankan pendapatan keluarga (Gambar 2).

Ketiga, studi ini menemukan bahwa PPS 2014 sangat kecil pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan. Hal ini diduga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (i) nilai nominal bantuan tunai serta nilai manfaat asuransi kesehatan yang tidak memadai, dan (ii) waktu pemberian bantuan yang tidak tepat.

Seiring bertambahnya beban perempuan dalam keluarga miskin saat mata pencaharian utama laki-laki mengalami gangguan, diperlukan upaya bersama pada tingkat keluarga terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Pemerintah juga dapat mulai merancang program perlindungan sosial yang ditargetkan khusus bagi perempuan miskin, misalnya pemberian beasiswa bagi siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai upaya penggantian peran pengasuhan anak saat kedua orang tuanya bekerja. Selain itu, saat terjadi guncangan, program bantuan tunai tidak bersyarat seperti PSKS memberikan ruang lebih luas bagi rumah tangga sasaran dalam mengalokasikan tambahan dana tersebut untuk pos-pos pengeluaran utama. Program semacam ini bersifat lebih responsif dan adaptif terhadap segala kemungkinan guncangan yang menimpa kehidupan masyarakat miskin, bahkan guncangan berskala rumah tangga sekalipun yang sulit terdeteksi oleh Pemerintah Pusat. ❖

¹ Deli Serdang, Cilacap, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya, serta Pangkajene dan Kepulauan.

² Tiga program perlindungan sosial tersebut adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Kerja sama perdagangan multilateral antarnegara ASEAN dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi dimulai pada 31 Desember 2015. Skema kerja sama regional ini dimaksudkan untuk meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ASEAN sebagai basis produksi dan pasar tunggal. Pelaksanaan MEA mendatangkan peluang sekaligus ancaman bagi sistem dan pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai akibat adanya harmonisasi peraturan serta peningkatan aliran barang, jasa, dan investasi yang lebih terbuka. Dalam rangka mempersiapkan kebijakan untuk penguatan pelayanan kesehatan di Indonesia pada era MEA, The SMERU Research Institute bersama Bappenas melakukan kajian “Penguatan Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Masyarakat ASEAN: Implikasi MEA”. Kajian ini dilaksanakan dari Mei 2016 hingga Februari 2017 dan bertujuan mengidentifikasi implikasi MEA pada lima elemen pelayanan kesehatan serta menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi MEA.

Kajian ini menemukan bahwa keberadaan MEA dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan pada berbagai elemen pelayanan kesehatan di Indonesia (lihat infografis) dengan cara meningkatkan distribusi, kualitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dalam bentuk pengembangan industri bahan baku obat dan alat kesehatan; peningkatan kualitas produk farmasi, alat kesehatan, dan obat tradisional; peningkatan mutu layanan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan mendorong pengembangan pariwisata medis dan *wellness* (kebugaran) di Indonesia.

Agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang keterbukaan pasar pada era MEA, pemerintah perlu memperbaiki sistem insentif tenaga kesehatan agar tidak terjadi *brain drain* (hengkangnya tenaga ahli ke luar negeri). Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap tenaga kesehatan asing; fasyankes; serta produk obat, alat kesehatan, dan obat tradisional yang beredar di dalam negeri guna menjamin tersedianya layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Untuk mengembangkan pariwisata medis dan *wellness*, pemerintah perlu membentuk *health tourism board* (badan pariwisata kesehatan), mempromosikan kualitas fasyankes di Indonesia baik ke dalam maupun ke luar negeri, dan menyinergikan langkah tersebut dengan penyediaan layanan kesehatan tradisional. ❖



KERANGKA KONSEPTUAL DAMPAK MASYARAKAT EKONOMI ASEAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN





M. Fajar Rakhmadi/SMERU

DARI MDGs KE SDGs: PELAJARAN, TANTANGAN, DAN ANTISIPASI KEBIJAKAN

Agenda pembangunan global yang terangkum dalam Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) berakhir pada 2015 dan Indonesia berkomitmen mengadopsi agenda pembangunan baru yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) untuk 15 tahun ke depan. Agenda SDGs dinilai melampaui MDGs karena memperhitungkan akar penyebab kemiskinan dan kebutuhan universal untuk pembangunan yang inklusif melalui pencapaian 17 tujuan dan 169 target. Agar bisa mencapai target dengan lebih baik, Indonesia perlu berpijak pada kondisi pembangunan saat ini serta capaian MDGs.

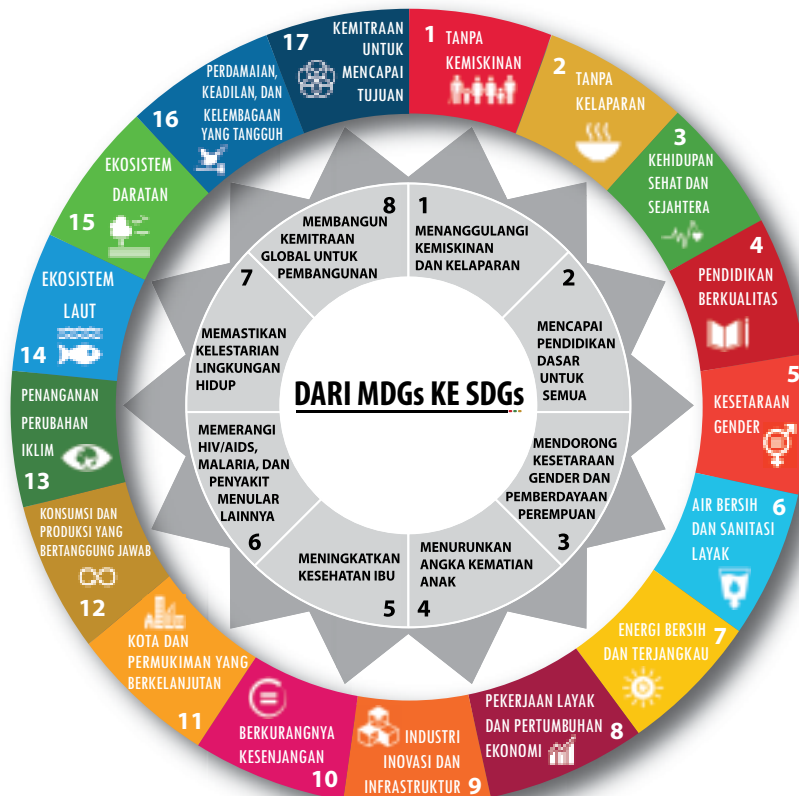
Untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam upaya mencapai target SDGs, pada akhir 2015 hingga awal 2016 SMERU bersama Bappenas melakukan kajian berbasis studi literatur, analisis data sekunder, serta rangkaian diskusi pakar di tingkat nasional dan di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Kajian ini menyoroti capaian target MDGs serta mandat baru SDGs dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin akan dihadapi Indonesia dalam upaya mencapai SDGs, khususnya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketimpangan.

Pelajaran utama dari pelaksanaan MDGs yang relevan untuk SDGs adalah perlunya segera dilakukan sinkronisasi agenda pembangunan global tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, peranan dan rasa kepemilikan pemerintah daerah (pemda) perlu terus ditingkatkan karena merekalah yang menjadi ujung tombak kesuksesan pelaksanaan agenda pembangunan global ini.



Di samping itu, pemantauan dan evaluasi MDGs yang lalu juga terkendala oleh ketersediaan data yang kredibel. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan data indikator SDGs, setidaknya hingga tingkat kabupaten/kota.

Kendala lain yang perlu diatasi adalah lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemda, serta antarlembaga lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah, keterbatasan fiskal, dan minimnya sosialisasi serta partisipasi publik. Pembagian tugas dalam pencapaian serta pemantauan SDGs antara Pemerintah Pusat dan pemda sangat strategis untuk segera dilakukan. Dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas sejak awal pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dapat dilakukan di tingkat lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya dari donor seperti yang terjadi pada pelaksanaan MDGs. ❖



PELAJARAN & TANTANGAN



TAHUN AWAL PELAKSANAAN UU DESA: DI MANA PERANAN KAUM MARGINAL?

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)—yang mulai dilaksanakan pada 2015—melahirkan harapan akan terlaksananya demokratisasi di tingkat lokal, termasuk penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). Berkenaan dengan hal tersebut, SMERU, bekerja sama dengan PNPM Support Facility (PSF) Bank Dunia, melakukan studi pemantauan implementasi UU Desa dengan fokus pada isu tata kelola pemerintahan desa. Studi ini bertujuan memahami: (i) praktik tata kelola yang mencakup prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas; (ii) daya tanggap pemerintah desa terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya, terutama kelompok marginal; dan (iii) eksistensi serta kontribusi institusi lokal (seperti Badan Permusyawaratan Desa, disingkat BPD, dan/atau lembaga adat) dan aktivis desa (seperti aktor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, atau PNPM) dalam implementasi UU Desa. Studi longitudinal (November 2015 hingga Juli 2018) ini dilaksanakan di sepuluh desa yang berlokasi di lima kabupaten, dengan menempatkan seorang peneliti lokal untuk tinggal (*live in*) di masing-masing kabupaten dan mencatat kegiatan formal dan informal yang diselenggarakan berbagai pihak—masyarakat, lembaga/pihak pemerintah (terutama desa, lalu kecamatan dan kabupaten), maupun kalangan nonpemerintah—dalam proses pelaksanaan UU Desa.

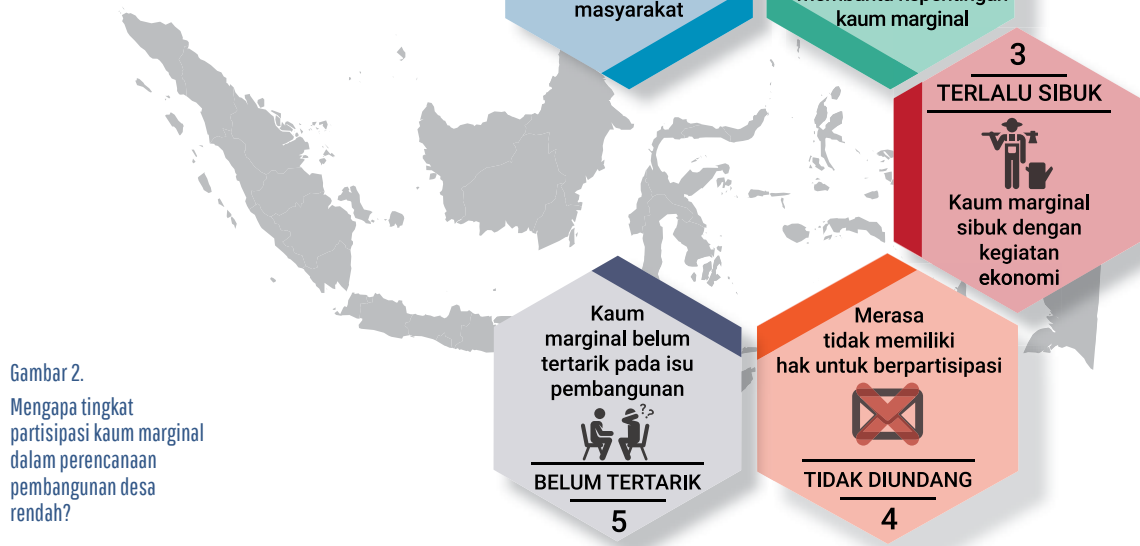


Gambar 1.
Wilayah penelitian



Hasil studi *baseline* (awal) dan pemantauan sepanjang November 2015 hingga April 2016 memperlihatkan bahwa keterlibatan kaum marginal—sering dirujuk sebagai kelompok perempuan dan orang miskin yang umumnya tereksklusi—dalam perencanaan pembangunan desa masih terbatas. Belum terlihat adanya perubahan signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelum berlakunya UU Desa. Setidaknya ada dua penyebab kondisi ini, yaitu: (i) desain proses perencanaan pembangunan desa yang terbatas dan masih didominasi elite desa, dan (ii) rendahnya motivasi warga untuk berpartisipasi, di satu sisi, serta kesibukan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di sisi lain.

PENYEBAB RENDAHNYA PARTISIPASI KAUM MARGINAL



Gambar 2.
Mengapa tingkat partisipasi kaum marginal dalam perencanaan pembangunan desa rendah?

Untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal, dibutuhkan peningkatan kesadaran akan pentingnya pembangunan inklusif hingga tingkat desa. Proses tersebut dapat didukung melalui peraturan terkait alokasi anggaran desa yang secara eksplisit mengafirmasi kebutuhan kelompok miskin dan perempuan (*pro-poor and pro-women policies*). Peran BPD, kelompok masyarakat, kader/pendamping, dan aktor lain di tingkat lokal sebagai saluran aspirasi bagi kelompok marginal juga perlu dioptimalkan. Pengoptimalan dapat dilakukan dengan, antara lain, mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih proaktif, misalnya *blusukan* ke rumah tangga miskin dan wilayah dusun terpencil. ❖



PUBLIKASI SMERU 2016

Sepanjang 2016, SMERU telah mempublikasikan 9 laporan, 2 kertas kerja, dan 2 catatan kebijakan, dan menyebarkannya kepada berbagai pemangku kepentingan SMERU.



LAPORAN PENELITIAN

Kajian Cepat terhadap Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011

Hastuti, Syaikhul Usman, Bambang Sulaksono, Robert Justin Sodo, Asri Yusrina, Rahmitha, Gracia Hadiwidjaja, dan Prio Sambodho

Oktober 2016



KERTAS KERJA

Inequality and Stability in Democratic and Decentralized Indonesia

Mohammad Zulfan Tadjoeeddin (Western Sydney University, Australia), Athia Yumna (The SMERU Research Institute), Sarah E. Gultom (Monash University, Malaysia), M. Fajar Rakhmadi (The SMERU Research Institute), M. Firman Hidayat (Bappenas), dan Asep Suryahadi (The SMERU Research Institute)

April 2016



CATATAN KEBIJAKAN

■ Seri UU Desa No. 2/2016; Membenahi BPD untuk Memperkuat Desa

Palmira Permata Bachtiar

Agustus 2016

■ No. 1/2016; Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk Indonesia untuk Mendukung Program SDGs dan Perencanaan Pembangunan

Irdam Ahmad

April 2016



PUBLIKASI LAINNYA

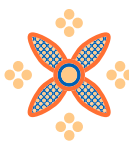
Laporan Tahunan 2015

November 2016



Newsletter No. 37/2016 – Community Coping Strategies for Facing Food Price Volatility/Strategi Bertahan Masyarakat dalam Menghadapi Gejolak Harga Pangan

Desember 2016



PUBLIKASI YANG HANYA DIUNGGAH KE SITUS WEB SMERU

LAPORAN PENELITIAN

1. **Multidimensional Poverty of Farmers: Results of Participatory Assessment in Gampong Cahya, Kabupaten Aceh Timur**
Sirojuddin Arif dan Herry Widjanarko
September 2016 (final)
2. **Monitoring and Evaluation of Development Programs in Five Ministries: A Study on the System and Implementation**
Akhmadi, Hastuti, Armand Arief Sim, Athia Yumna, Gracia Hadiwidjaja, Nina Toyamah, Radi Negara, Rahmitha, Sri Budiayati, Syaikhu Usman, dan Yudi Fajar M. Wahyu
Juni 2016 (final)
3. **Pelaksanaan Sistem Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat (SPKOM) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah**
Akhmadi, Asri Yusrina, dan Athia Yumna
Juni 2016 (final)
4. **The Dynamics of Poor Women's Livelihood: A Case Study amidst a Fuel Price Change**
Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y. D. Utari, Joseph Natanael Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan Michelle Andrina
Desember 2016 (draf)
5. **A Socioeconomic Analysis of National Road Improvements in Indonesia: A Case Study of the EINRIP 2015 Road Improvement in Dompu and Sumbawa**
Yudi Fajar M. Wahyu, Bambang Sulaksono, dan Widjajanti Isdijoso
November 2016 (draf)
6. **Dinamika Penghidupan Perempuan Miskin: Studi Kasus Ketika Terjadi Perubahan Harga BBM**
Niken Kusumawardhani, Dyan Widyaningsih, Valentina Y.D. Utari, Joseph Natanael Marshan, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan Michelle Andrina
September 2016 (draf)
7. **Penghidupan Perempuan Miskin dan Akses Mereka terhadap Pelayanan Umum**
Rahmitha, Hastuti, Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi
Juni 2016 (draf)
8. **Poor Women's Livelihoods and Access to Public Services**
Rahmitha, Hastuti, Dyan Widyaningsih, Niken Kusumawardhani, Dinar Dwi Prasetyo, Hafiz Arfyanto, Veto Tyas Indrio, dan M. Fajar Rakhmadi
Mei 2016 (draf)

KERTAS KERJA

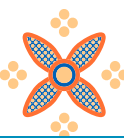
1. **Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota**
Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi
September 2016 (final)
2. **Determining Comprehensive Criteria and Census Variables for the Protection of the Poor at the Local Level**
Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi, dan Akhmadi
September 2016 (final)

RANGKUMAN EKSEKUTIF

1. **Opinion Leader Research on Barriers to Optimal Infant and Young Child Feeding Practices in Indonesia**
Rika Kumala Dewi, Ulfah Alifia, Nurmala Selly Saputri, Vita Febriany, dan Intani Nur Kusuma
Agustus 2016 (final)

TULISAN SMERU DALAM PUBLIKASI ORGANISASI LAIN

1. **Reflection: Making Children's Voices Count**
Rendy Adriyan Diningrat
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
2. **Meet the Expert: Quality Life for Indonesia Children**
Rachma Indah Nurbani
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
3. **Young Researcher Profile: Rendy Adriyan Diningrat**
Rendy Adriyan Diningrat
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-40, Desember 2016
4. **Reflections: Barriers to Optimal Breastfeeding and Complementary Feeding Practices in Indonesia**
Rika Kumala Dewi
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
5. **Young Researcher Profile: Rika Kumala Dewi**
Rika Kumala Dewi
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
6. **Meet the Expert: Athia Yumna**
Athia Yumna
Artikel di buletin NTS-Asia, edisi ke-39, Desember 2016
7. **Protecting Poor Pregnant Mothers and Newborns in the Era of Universal Health Care Scheme: Case of Indonesia**
Athia Yumna, Sri Budiati, Asep Kurniawan, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan Kartawijaya
Poster elektronik yang diterbitkan Fourth Global Symposium on Health Systems Research
8. **Universal Health Care Scheme Consequences on Local Health Financing: Indonesia's Experience**
Asep Kurniawan, Athia Yumna, Sri Budiati, Nurmala Selly Saputri, Yudi Fajar M. Wahyu, dan Kartawijaya
Poster elektronik yang diterbitkan Fourth Global Symposium on Health Systems Research
9. **Sub-national Health Care Financing Reforms in Indonesia**
Robert Sparrow, Sri Budiati, Athia Yumna, Nila Warda, Asep Suryahadi, dan Arjun S. Bedi
Artikel jurnal yang diterbitkan dalam Health Policy and Planning



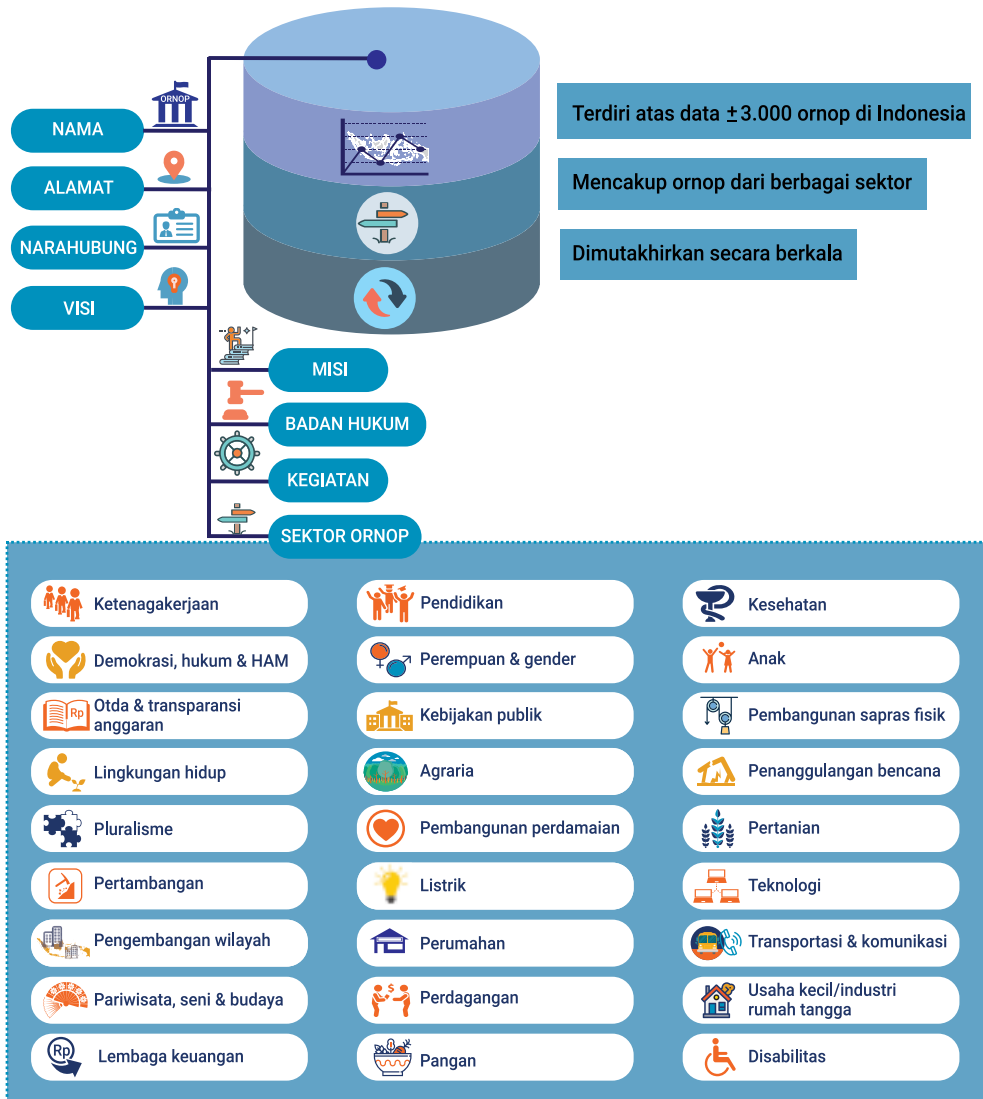
DATA & INFORMASI

SMERU membuka akses bagi publik terhadap pangkalan data ornop dan peta kemiskinannya secara *online* (dalam jaringan). Berikut ini gambaran singkat mengenai kedua produk tersebut.

PANGKALAN DATA ORNOP

Pangkalan Data Ornop SMERU merupakan sumber data ornop *online* yang paling lengkap di Indonesia. Pangkalan data ini dapat memfasilitasi individu/lembaga dalam mengontak ornop-ornop di Indonesia. Selain itu, pangkalan data ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang sedang melakukan penelitian tentang ornop di Indonesia.

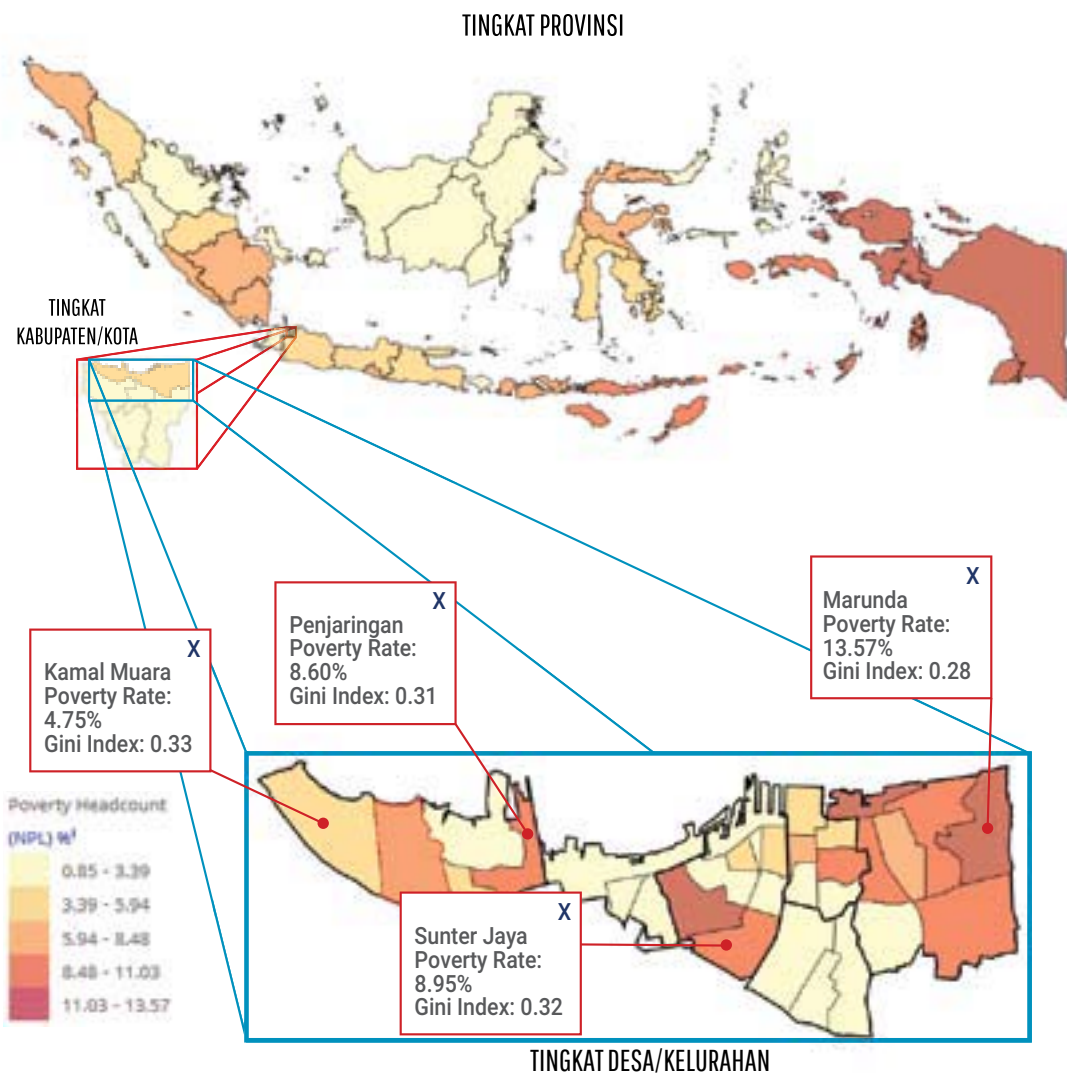
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pangkalan Data Ornop SMERU, hubungi Hariyanti Sadaly di hari@smeru.or.id.



PETA KEMISKINAN DAN PENGHIDUPAN INDONESIA 2015

Peta Kemiskinan dan Penghidupan Indonesia 2015 merupakan peta kemiskinan yang mutakhir. Penyusunan peta ini menggunakan data Sensus Penduduk 2010, Susenas 2010 dan 2015, serta Podes 2014. Peta ini menyediakan statistik kemiskinan hingga tingkat desa serta mengombinasikan angka kemiskinan dengan informasi sosial-ekonomi guna meningkatkan mutu analisis kemiskinan. Oleh karena itu, peta ini merupakan sumber data yang kaya untuk penelitian dan penetapan sasaran kebijakan dan program.

Untuk menggunakan peta ini, kunjungi povertymap.smeru.or.id.



• SMERU DI INTERNET •

SEPANJANG 2016



-FACEBOOK-

FANPAGE LIKES
MENINGKAT

77%

**JUMLAH
FANPAGE LIKES**



**KOMPOSISI
FANPAGE
FOLLOWERS**



45%



55%

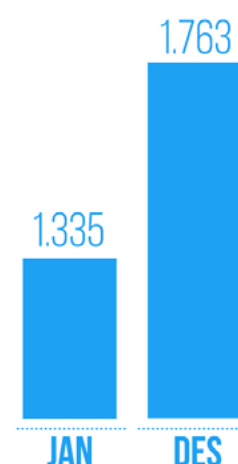


-TWITTER-

FOLLOWERS
MENINGKAT

32%

**JUMLAH
FOLLOWERS**



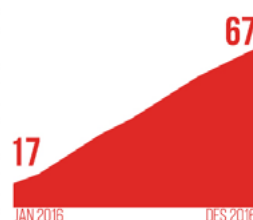
**JUMLAH
PROFILE VISITS**

9.905 KALI



-YOUTUBE-

SUBSCRIBERS
MENINGKAT



TOTAL VIEWS
MENINGKAT
DARI

2.945 VIEWS

8.449 VIEWS

WATCH TIMES
MENINGKAT
DARI

13.493 MENIT

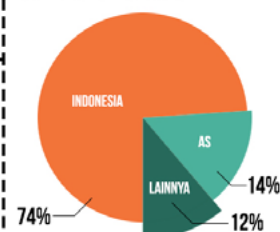
41.800 MENIT

WWW

-SITUS WEB-

WEB VISITS
SEBANYAK
1.395.879 KALI

**KOMPOSISI
WEB VISITS**

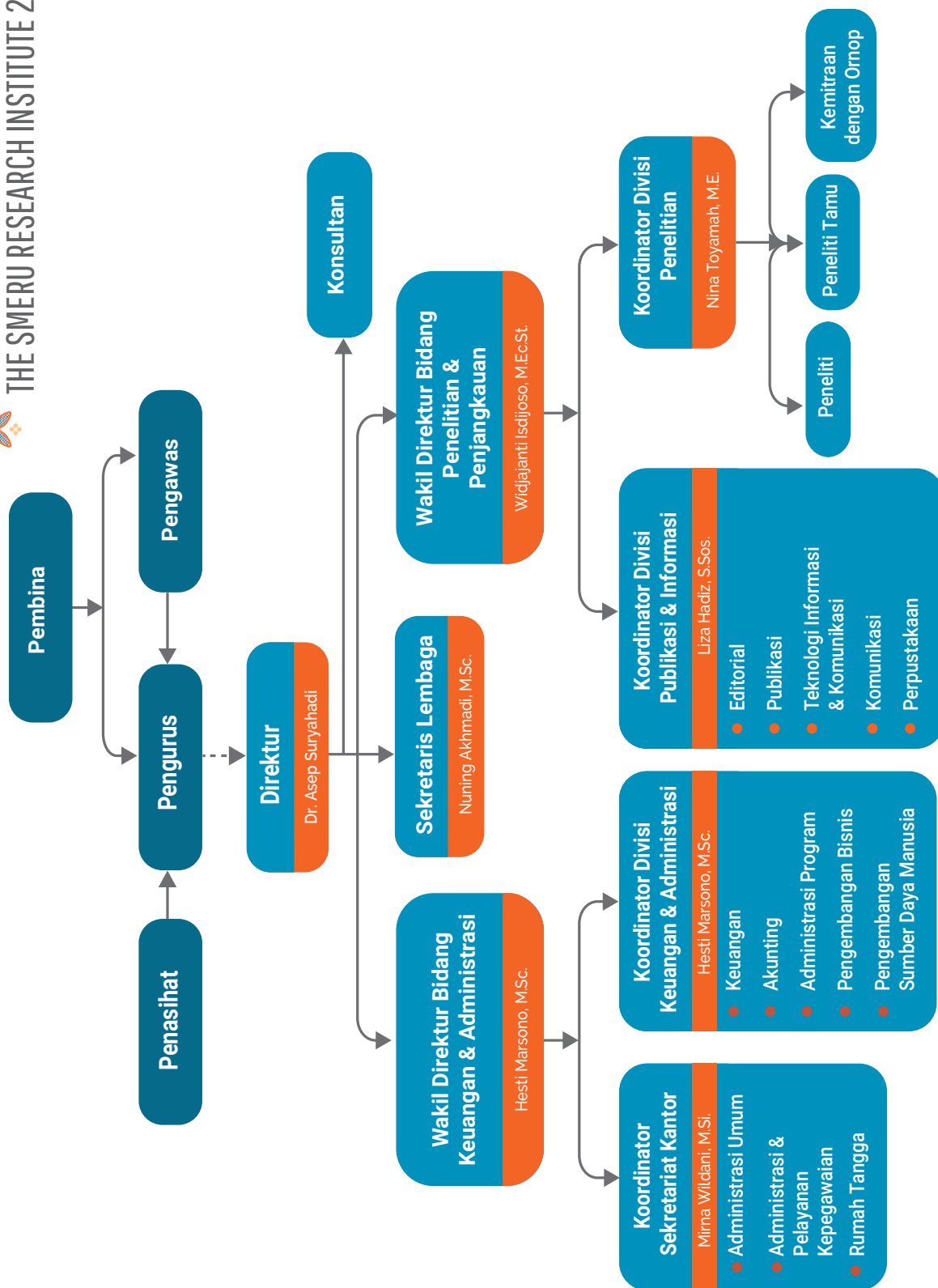


**4 LAPORAN
TERBANYAK
DIUNDUH**

- 1.565 KALI** PERAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN UU DESA
- 1.384 KALI** RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA
- 1.289 KALI** ENHANCING ROLE OF FAMILY AND SOCIAL WORKER FOR CHILDREN WITH DISABILITY
- 1.105 KALI** ECONOMIC GROWTH AND POVERTY REDUCTION IN INDONESIA BEFORE AND AFTER THE ASIAN FINANCIAL CRISIS



Keluarga besar SMERU dalam acara Annual Strategic Meeting 2016 di Yogyakarta



YAYASAN SMERU



PEMBINA

Dr. Syaikhul Usman	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Gregory Churchill, JD	Wakil Ketua	Konsultan hukum & dosen (purnatugas)
Dr. Joan Hardjono	Anggota	Peneliti independen, Bandung
Dr. Sudarno Sumarto	Anggota	The SMERU Research Institute & TNP2K, Jakarta
Dr. Syarif Hidayat	Anggota	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta
Dr. Chris Manning	Anggota	The Australian National University, Canberra, Australia



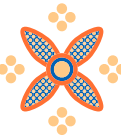
PENGURUS

Dr. Asep Suryahadi	Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.	Wakil Ketua	The SMERU Research Institute, Jakarta
Nuning Akhmadi, M.Sc.	Sekretaris	The SMERU Research Institute, Jakarta
Hesti Marsono, M.Sc.	Bendahara	The SMERU Research Institute, Jakarta



PENGAWAS

Dr. Ilyas Saad	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Jakarta
Bambang Sulaksono, M.M.	The SMERU Research Institute, Jakarta



PENASIHAT

Prof. Boediono	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Dr. Chris Manning	The Australian National University, Canberra, Australia
Prof. James J. Fox	The Australian National University, Canberra, Australia
Dr. Joan Hardjono	Peneliti independen, Bandung
Prof. Gavin W. Jones	National University of Singapore, Singapura
Prof. Gustav F. Papanek	Boston Institute for Developing Economies, Boston, Amerika Serikat
Prof. Lant H. Pritchett	Harvard University, Cambridge MA, Amerika Serikat
Prof. Mohamad Ikhsan	Universitas Indonesia, Jakarta
Dr. Solita Sarwono	Konsultan lepas, Wassenaar, Belanda



Bambang C. Hadi/SMERU

THE SMERU RESEARCH INSTITUTE



MANAJEMEN

DIREKTUR

Dr. Asep Suryahadi

WAKIL DIREKTUR BIDANG PENELITIAN & PENJANGKAUAN

Widjajanti Isdijoso, M.Ec.St.

WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI & KEUANGAN

Hesti Marsono, M.Sc.

SEKRETARIS LEMBAGA

Nuning Akhmadi, M.Sc.



DIVISI PENELITIAN

KOORDINATOR

- Nina Toyamah, M.E.

PENELITI UTAMA

- Dr. Sudarno Sumarto
- Dr. Syaikhul Usman

PENELITI SENIOR

- Athia Yumna, M.Sc.
- Bambang Sulaksono, M.M.
- Dr. Heni Kurniasih
- Luhur Bima, M.Sc.
- M. Sulton Mawardi, M.Comm.
- Muhammad Syukri, M.Si.
- Palmira Permata Bachtiar, M.Phil.
- Rachma Indah Nurbani, M.A.
- Dr. Stella Aleyda Hutagalung

PENELITI

- Akhmadi, S.E.
- Ana Rosidha Tamyis, M.M.
- Asep Kurniawan, S.I.P.
- Asri Yusrina, MEcon
- Dyan Widyaningsih, S.Sos.
- Emmy, MPH
- Gema Satria Mayang Sedyadi, M.S.
- Ir. Hastuti
- Joseph Nathanael Marshan, M, E.c
- Mayang Rizky, M.Sc.
- Meuthia Rosfadhila, M.P.P.

PENELITI

- Michelle Andrina, M.S.E.
- Niken Kusumawardhani, M.Sc.
- Nila Warda, MEc Pol
- Rika Kumala Dewi, MDS
- Rendy Andriyan Diningrat, M.Eng.
- Ulfah Alifia, M.Si.
- Valentina Y. D. Utari, MDS
- Yudi Fajar M. Wahyu, M.A.

PENELITI JUNIOR

- Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, S.E.
- Budiani, S.Sos.
- Elza Samantha Elmira, MPH (Adv)
- Fatin Nuha Astini, M.AP
- Hafiz Arfyanto, S.E.
- Nurmala Selly Saputri, SKM
- Rezanti Putri Pramana, B.Sc. (Hons) in Psychology
- Ridho Al Izzati, S.E.
- Ruhmaniyati, S.E.
- Veto Tyas Indrio, S.E.

PENELITI MITRA

- Dr. Daniel Suryadarma

STAF KEMITRAAN ORNOP

- Ir. Hariyanti Sadaly



DIVISI PUBLIKASI & INFORMASI

KOORDINATOR

- **Liza Hadiz, S.Sos.**

PENERJEMAH/EDITOR SENIOR

- **Budhi Adrianto, S.T.**
- **Mukti Mulyana, S.I.P.**

PENERJEMAH/EDITOR

- **Gunardi Handoko**

EDITOR & PENERJEMAH

- **Bryanna Wilson, B.A**

STAF PUBLIKASI & DISTRIBUSI

- **Heru Sutapa, S.Kom.**

STAF PUBLIKASI & DESAIN

- **Novita Maizir, S.Sos.**

STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI SENIOR

- **Bambang C. Hadi, M.Sc.**

STAF TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI JUNIOR

- **Toni Parwanto, S.Kom.**

STAF KOMUNIKASI

- **Ratri Indah Septiana, M.A.**

PUSTAKAWAN

- **Stevanus Yulyanto, S.Hum.**



DIVISI KEUANGAN & ADMINISTRASI

STAF AKUNTING SENIOR

- **Aris Kustanto, S.E.**

STAF KEUANGAN SENIOR

- **Rusky Aviandhi, M.M.**

KOORDINATOR SEKRETARIAT KANTOR

- **Mirna Wildani, M.Si.**

ASISTEN KANTOR

- **Aang Ahbari**
- **Abdul Rokhim**
- **Dakim**
- **Gogo Margo**

SOPIR

- **E. Muchtar**

STAF ADMINISTRASI PROGRAM JUNIOR

- **Felisita Lethe, S.Ip**

STAF ADMINISTRASI KANTOR

- **Mardiani**

ASISTEN ADMINISTRASI KANTOR

- **Supriyadi**

SATPAM

- **Abdul Hakim**
- **Adi Panca**
- **Eka Permana**
- **Subiyantoro**

YAYASAN SMERU Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Disajikan dalam Rupiah)

	2016 (Belum teraudit)	2015 (Belum teraudit)
ASET		
Aset lancar		
Kas dan setara kas	21,254,969,260	24,658,691,468
Investasi jangka pendek	18,223,808,262	15,665,090,789
Uang muka	185,000,000	430,473,400
Piutang lain-lain	689,027,224	521,966,660
Biaya dibayar dimuka	492,267,230	265,838,679
Jumlah aset lancar	40,845,071,976	41,542,060,996
Aset tidak lancar		
Aset tetap - bersih	8,051,623,878	8,156,878,387
Jumlah aset tidak lancar	8,051,623,878	8,156,878,387
Jumlah aset	48,896,695,854	49,698,939,383
	2016 (Belum teraudit)	2015 (Belum teraudit)
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		
Kewajiban		
Utang pajak	92,980,800	71,040,500
Biaya yang masih harus dibayar	188,700,429	152,928,979
Utang lain-lain	17,060,051	9,514,590
Kewajiban imbalan kerja	2,510,420,000	2,118,020,000
Jumlah kewajiban	2,809,161,280	2,351,504,069
Aset bersih		
Tidak terikat	44,303,312,919	45,683,976,724
Terikat temporer	1,657,451,980	1,536,688,915
Terikat permanen	126,769,675	126,769,675
Jumlah aset bersih	46,087,534,574	47,347,435,314
Jumlah kewajiban dan aset bersih	48,896,695,854	49,698,939,383

YAYASAN SMERU
Laporan Aktivitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(Disajikan dalam Rupiah)

		2016 (Belum teraudit)		2015 (Belum teraudit)
	Terikat temporer	Tidak terikat	Jumlah	
Penerimaan				
Penerimaan dari donor	21,681,681,827	-	21,681,681,827	26,056,147,819
Penerimaan dari lain-lain	-	448,319,842	448,319,842	(634,912,666,14)
Laba / rugi yang belum realisasi	-	-	-	-
Jumlah penerimaan	21,681,681,827	448,319,842	22,130,001,669	25,421,235,153
Pengeluaran				
Beban program	10,784,450,010	-	10,784,450,010	17,749,404,238
Beban operasional		11,963,005,762	11,963,005,762	7,445,646,232
Beban penyusutan		119,864,509	119,864,509	165,711,006
Beban lain-lain		522,582,129	522,582,129	371,964,849
Jumlah pengeluaran	10,784,450,010	12,605,452,399	23,389,902,409	25,732,726,324
Perubahan dalam aset bersih	10,897,231,818	(12,157,132,558)	(1,259,900,740)	(311,491,171)

YAYASAN SMERU
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

	Terikat temporer	Terikat permanen	Tidak terikat	Jumlah
Aset bersih awal, 01 Januari 2015	31,275,408,701	126,769,675	16,256,748,109	47,658,926,485
Perubahan aset bersih	(29,738,719,786)	-	29,427,228,615	(311,491,171)
Aset bersih akhir, 31 Desember 2015	1,536,688,915	126,769,675	45,683,976,724	47,347,435,314
Perubahan aset bersih	120,763,065	-	(1,380,663,805)	(1,259,900,740)
Aset bersih akhir, 31 Desember 2016	1,657,451,980	126,769,675	44,303,312,919	46,087,534,574

YAYASAN SMERU
Laporan Arus Kas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

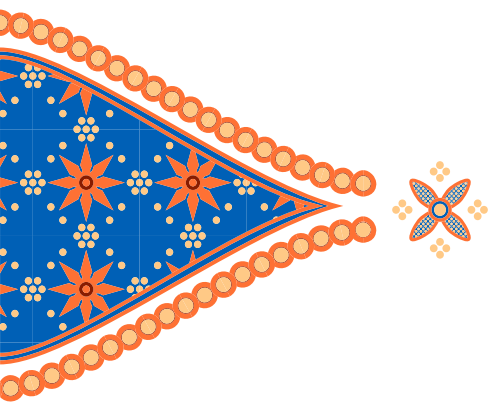
(Disajikan dalam Rupiah)

	2016 (Belum teraudit)	2015 (Belum teraudit)
Arus kas dari aktivitas operasi		
Perubahan aset bersih	(1,259,900,740)	(311,491,171)
Penyesuaian untuk merekonsiliasi kelebihan penerimaan atas pengeluaran pada kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi:		
Penyusutan	119,864,509	165,711,006
Laba/rugi yang belum direalisasi atas Investasi	-	-
Penurunan (peningkatan) pada:		
Uang muka	245,473,400	(380,473,400)
Piutang lain-lain	(167,060,564)	5,261,743,199
Biaya dibayar dimuka	(226,428,551)	(67,603,157)
Utang pajak	21,940,300	(32,429,675)
Biaya yang masih harus dibayar	35,771,450	138,420,478
Utang lain-lain	7,545,461	7,991,890
Kewajiban imbalan kerja	392,400,000	204,154,500
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	(830,394,735)	4,986,023,669
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan investasi	15,665,090,789	26,976,771,624
Penempatan pada investasi	(18,223,808,262)	(33,861,249,936)
Perolehan aset tetap	(14,610,000)	2,400,000
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(2,573,327,473)	(6,882,078,312)
Penurunan Bersih Kas	(3,403,722,209)	(1,896,054,643)
Kas dan setara kas, awal	24,658,691,468	26,554,746,111
Kas dan setara kas, akhir	21,254,969,260	24,658,691,468



Mukti Mulyana/SMERU

Kantor SMERU di kawasan Cikini, Jakarta



DEWAN REDAKSI

Asep Suryahadi
Widjajanti Isdijoso
Syaikhu Usman
Nuning Akhmadi
Nina Toyamah

REDAKSI

Pengumpul Data
Ratri Indah Septiana
Felisita Lethe

Penerjemah/Editor

Budhi Adrianto
Gunardi Handoko
Liza Hadiz

Desainer Grafis

Novita Maizir

Desainer Infografis

Stevanus Yulyanto
Ruhmaniyati
Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma
Nurmala Selly Saputri
Novita Maizir

Staf Distribusi

Heru Sutapa

Foto Sampul: Palmira Permata Bachtiar



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330, Indonesia

 +6221 3193 6336;
+6221 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 www.smeru.or.id



 The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 The SMERU Research Institute

 The SMERU Research Institute



9 786027 901438



9 772597 881003